

**SKRIPSI**

***Coretax: Inovasi, Implementasi dan Tantangan***



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : PUTU RESVITITAH BENNY SIMAYANTI**  
**NIM : 2115654094**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**  
**2025**

## **Coretax: Inovasi, Implementasi dan Tantangan**

Putu Resvititah Benny Simayanti  
2115654094

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

### **ABSTRAK**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan transformasi sistem perpajakan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan perpajakan. Salah satu upaya konkret dalam transformasi ini adalah implementasi sistem *Coretax* sebagai infrastruktur digital yang mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan perpajakan dalam satu sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi, implementasi, dan tantangan dalam penggunaan *Coretax* dengan menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)*, khususnya pada dimensi *Perceived Usefulness* dan *Perceived Ease of Use*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis konten, dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap empat kelompok informan, yaitu pejabat DJP, dosen perpajakan, konsultan pajak, dan wajib pajak. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk menggambarkan persepsi dan pengalaman para informan terhadap penggunaan sistem *Coretax*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Coretax* dipandang sebagai inovasi yang mampu menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan akurasi data, serta memperkuat integrasi layanan internal DJP. Namun demikian, tantangan masih ditemukan, terutama dalam hal kesiapan pengguna non-teknologis, kebutuhan pelatihan yang berkelanjutan, serta kendala teknis pada stabilitas sistem dan aksesibilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat penerimaan teknologi sangat dipengaruhi oleh efisiensi sistem saat dioperasikan serta persepsi kemudahan penggunaan oleh berbagai kalangan pengguna.

**Kata Kunci:** *Coretax*, TAM, Implementasi Sistem, Inovasi Perpajakan

## ***Coretax: Innovation, Implementation dan Challenges***

Putu Resvititah Benny Simayanti

2115654094

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

### ***ABSTRACT***

*The Directorate General of Taxes (DJP) is implementing a tax system transformation to improve the efficiency, transparency, and accountability of tax administration services. One of the concrete efforts in this transformation is the implementation of the Coretax system—a digital infrastructure that integrates various tax service applications into a unified system. This study aims to analyze the innovation, implementation, and challenges in the use of Coretax by applying the Technology Acceptance Model (TAM), particularly focusing on the dimensions of Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing content analysis, documentation, and in-depth interviews with four groups of informants: DJP officials, tax academics, tax consultants, and taxpayers. The data collected were thematically analyzed to illustrate the perceptions and experiences of the informants regarding the use of the Coretax system. The findings indicate that Coretax is perceived as an innovation that simplifies administrative processes, enhances data accuracy, and strengthens the integration of DJP's internal services. However, challenges remain, especially in terms of non-technological user readiness, the need for continuous training, and technical issues related to system stability and accessibility. This study concludes that the level of technology acceptance is significantly influenced by the system's operational efficiency and users' perceived ease of use across various stakeholder groups.*

***Keywords: Coretax, Technologi Acceptance Model, Implementation System, Tax Innovation***

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>ii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Penetapan Kelulusan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	12
C. Alur Pikir.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>16</b>
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	17
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	18
D. Keabsahan Data.....	22
E. Analisis Data .....	23
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>26</b>
A. Hasil Penelitian .....	26
B. Pembahasan.....	30
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>45</b>
A. Simpulan .....	45
B. Implikasi.....	45
C. Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>52</b>

## DAFTAR TABEL

Table 3. 1 Daftar Informan Wawancara .....	19
Table 3. 2 Daftar Video yang Dianalisis .....	20
Table 4.1 Tabel Hasil Penelitian.....	29



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikiran.....	15
Gambar 3. 1 Teknik Pengumpulan Data Miles & Huberman Model.....	22
Gambar 3. 2 Teknik Analisis Data.....	23



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Hasil wawancara dengan informan Bapak Keren
2. Lampiran II : Hasil wawancara dengan informan Ibu Cantik
3. Lampiran III : Hasil wawancara dengan informan Bapak Sukses
4. Lampiran IV : Hasil wawancara dengan infroman Bapak Lancar
5. Lampiran V : Hasil wawancara dengan informan Ibu Baik



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi tetap menjadi tujuan makroekonomi setiap negara, baik negara maju maupun berkembang. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dimaksud pemerintah dibebankan tanggung jawab untuk menyediakan beberapa infrastruktur bagi warga negara baik itu stabilisasi ekonomi, redistribusi pendapatan dan penyediaan layanan ekonomi (Najicha, 2022). Kemampuan pemerintah merealisasi tanggung jawab tersebut salah satunya bergantung pada kuantitas pendapatan sebuah negara. Salah satu sumber tersebut adalah pajak. Administrasi perpajakan yang sebelumnya berbasis manual kini bertransformasi menjadi lebih digital, salah satunya melalui sistem e-filing dan e-billing yang mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Di Indonesia, era digitalisasi yang semakin berkembang pesat sekaligus membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan khususnya dalam sistem perpajakan yang menjadi aspek paling vital dalam keberlangsungan suatu negara (Ghina et al., 2020). Hal ini dipicu oleh revolusi industri 4.0 yang menciptakan transformasi sistem administrasi perpajakan menjadi sistem digital dengan penerapan *Artificial Intelligent (AI)*, *Big Data*, *Cloud Computing*, *Internet of Things (IoT)* dan lain sebagainya. Adanya perubahan pada era ini tentunya memberikan tantangan tersendiri sekaligus peluang bagi otoritas pajak terutama dalam efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan

(Mufidah & Anisaul, 2023). Oleh karenanya otoritas pajak terus berupaya untuk melakukan pembenahan guna menciptakan sistem perpajakan yang resilien dan *agile* melalui reformasi perpajakan (Victoriia, 2020). Seperti yang kita ketahui di Indonesia penerimaan pajak adalah salah satu tulang punggung dalam sistem keuangan negara yang mendorong pertumbuhan serta pembangunan ekonomi dan sosial (Rumapea, n.d.).

Hal ini diperkuat dengan adanya laporan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2023. Realisasi pendapatan negara tahun 2023 adalah sebesar Rp2.774,3 triliun. Sedangkan realisasi pendapatan pajak negeri ini sebesar Rp1.869,23 triliun atau hampir 67,73% (Kementerian Keuangan, 2024). Walaupun pajak menjadi penyumbang utama sumber pendapatan negara, namun penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal. Hal ini dapat kita lihat dari tingkatan angka *tax ratio* di Indonesia yang masih terbilang cukup rendah.

Ekonom senior *Asian Development Bank* (ADB) Aekapol Chongvilaivan menyebutkan bahwa sebagai negara berkembang setidaknya Indonesia harus memiliki tingkatan *tax ratio* sebesar 15% untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Kurniati, 2023). *Tax ratio* menunjukkan gambaran kinerja sistem perpajakan suatu negara. Pada tahun 2022 rasio pajak di Indonesia hanya 10,02% angka ini tentu saja masih dikatakan jauh jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia-Pasifik yang memiliki rata – rata ratio pajak sebesar 21% atau bahkan dengan negara – negara *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang

memiliki rata – rata rasio pajak sebesar 33,9% (OECD, 2023). Oleh karena itu melalui reformasi sistem administrasi perpajakan kali ini dilakukan pembenahan agar bisa mencapai target *tax ratio* (Darmayasa & Hardika, 2024)

Upaya peningkatan *tax ratio* di Indonesia mengalami sejumlah tantangan salah satunya adalah sistem administrasi perpajakan di Indonesia yang kurang memadai, seiring bertambahnya wajib pajak di Indonesia dan berkembangnya digitalisasi secara global. Disisi lain juga jumlah wajib pajak masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, berarti warga negara wajib membayar pajak, namun, terdapat kesenjangan antara keinginan masyarakat membayar pajak dengan harapan yang ditargetkan pemerintah (Joselin et al., 2024). Dan masih adanya masyarakat yang lalai membayar serta tidak melaporkan kewajibannya secara transparan (Cindy & Chelsya, 2024). Untuk mengatasi masalah *tax ratio* atau kepatuhan pajak yang kurang optimal reformasi perpajakan menjadi salah satu solusi terbaik untuk saat ini. Maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan rancangan ulang proses bisnis administrasi perpajakan guna menciptakan peningkatan pelayanan melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) dari yang sebelumnya digunakan ialah Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Melalui PSIAP, DJP membangun sistem informasi dan membenahi basis data perpajakan (Saptati, 2023). Sistem baru ini diperkenalkan dengan *core tax administration system* (CTAS). Aplikasi CTAS menggunakan sistem informasi berbasis *Commercial Off-The Shelf* (COTS) yang dengan harapan memudahkan DJP sebagai otoritas pajak dalam pengambilan

keputusan, meningkatkan efisiensi penerimaan pajak, mempermudah wajib pajak melaporkan kewajiban mereka, dan meminimalisir kemungkinan penghindaran pajak (Kusno et al., 2024)

CTAS dimulai dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 483/KMK.03/2020 mengenai keputusan pembentukan Tim Reformasi Perpajakan untuk melakukan pembaharuan perpajakan di Indonesia, yaitu dengan pembuatan Sistem Administrasi Perpajakan yang baru (A. Tofan, 2023). Awalnya CTAS direncanakan akan dipergunakan secara luas pada Juli 2024 namun dilakukan pengunduran hingga awal Januari 2025. Berdasarkan informasi yang diberikan di akun resmi DJP agen pengadaan mengumumkan pemenang tender sistem CTAS yaitu LG CNS – *Qualysoft Consortium* dengan memakan biaya kurang lebih Rp1,2 triliun yang dimana sumber pendanaan berasal dari DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat DJP Tahun Anggaran 2020 s.d 2024.

Menurut penelitian yang dilakukan (Wala & Tesalonika, 2024) CTAS yang diusung oleh DJP merupakan bentuk pembaruan dari pengelolaan perpajakan. CTAS diciptakan bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam pengelolaan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan secara khusus telah mengatur tata kelola teknologi informasi dan manajemen keamanan informasi hal ini mencakup aspek krusial seperti standar keamanan data, protokol pertukaran informasi, dan mekanisme pencadangan sistem yang menjamin keberlangsungan operasional *coretax*. Keberhasilan implementasi *coretax* sangat bergantung pada kesiapan teknologi, infrastruktur dan edukasi

bagi penggunaanya (Purnomo et al., 2025). Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang menyoroti pentingnya pelatihan dan stabilitas sistem dalam mendukung adopsi teknologi pajak karena akan ada banyak hambatan seperti seperti masalah teknis, rendahnya literasi teknologi, dan konektivitas

Penelitian ini berfokus pada implementasi coretax selama 7 bulan terakhir. Sistem CTAS dinilai belum stabil dengan masalah pembuatan akun yang tidak lancar dan gangguan yang terjadi pada website. Hal ini menyebabkan wajib pajak masih memperoleh petunjuk di kantor pelayanan pajak untuk mencari jawaban terkait tantangan yang bermunculan. Dampaknya cukup meresahkan wajib pajak dari berbagai kalangan terutama pelaku usaha karena menghambat pembayaran dan pelaporan pajak secara *online*. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan gambaran umum mengenai kebijakan pembaharuan CTAS dalam upaya penguatan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi informasi kepada pihak pemerintah khususnya DJP sebagai otoritas pajak sehingga dapat membuat langkah baru sebagai tindakan dari *incremental updates* yang tepat dalam perbaikan sistem CTAS.

Uraian latar belakang di atas, menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dari diterapkannya *Coretax* atau hasil dari penelitian terdahulu dengan implementasi nyata dilapangan yang sedang berjalan. Seiring dengan transformasi digital yang diterapkan melalui sistem *Coretax*, muncul berbagai respons dari para pengguna, mulai dari antusiasme terhadap kemudahan proses hingga kebingungan akibat kompleksitas fitur baru. Hal ini menimbulkan

pertanyaan mengenai sejauh mana sistem ini benar-benar dirasakan manfaatnya dan seberapa mudah pengguna beradaptasi dengan inovasi teknologi tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya dibutuhkan suatu pendekatan yang mampu mengidentifikasi faktor – faktor yang memengaruhi penerimaan sistem baru ini. Sehingga judul skripsi yang diajukan ialah **Coretax : Inovasi, Implementasi dan Tantangan..**

## **B. Rumusan Masalah**

Meskipun *coretax* membawa banyak inovasi, sistem ini masih menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana persepsi pengguna, baik wajib pajak, praktisi pajak, akademisi perpajakan maupun otoritas pajak terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan dari implementasi sistem *coretax* serta hambatan atau tantangan yang mempengaruhi alur kerja saat proses adaptasi sistem. Hal ini menjadi sangat menarik apakah dengan adanya *coretax* yang dianggap sebagai inovasi akan mempermudah proses penerimaan di masyarakat yang menggunakan berdasarkan prinsip TAM dan bagaimana tantangan yang dihadapi pada saat pengimplementasiannya?

## **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada aspek setelah diterapkannya *Coretax* selama hampir 7 bulan digunakan secara massal. Penelitian ini akan lebih banyak mengeksplor tentang opini dari beberapa narasumber baik dari sisi akademisi, wajib pajak, pegawai konsultan pajak melalui wawancara mendalam dan analisis isi dari konten video yang akan ditelaah mengenai hal – hal yang ingin

disampaikan para pembuat video terhadap sistem yang baru dan tentang keberhasilan dari diterapkannya sistem yang dianggap lebih modern tersebut. Dengan menggunakan teori pendekatan TAM, penelitian ini akan memahami pandangan dari berbagai kalangan dan mendapat banyak masukan tentang bagaimana sistem ini berhasil atau tidak setelah diterapkan dengan menggunakan dua dimensi utama yaitu persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Latar belakang rumusan masalah menjelaskan bahwa adanya transformasi sistem administrasi yang baru memberikan dampak positif dan negatif. Pemerintah selaku otoritas pajak meyakini bahwa kedepannya akan tercipta kepatuhan dengan adanya kemudahan integrasi data dalam sistem CTAS. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pengguna, yaitu wajib pajak, praktisi, akademisi, dan otoritas pajak terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sistem Coretax, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam proses implementasi dan adaptasi sistem tersebut dalam praktik perpajakan di Indonesia.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau berdampak untuk semua kalangan yang membacanya. Manfaat yang diharapkan tercapai sehubungan dengan diadakannya penelitian ini yaitu :

###### **a. Manfaat Teoretis**

CTAS merupakan wujud transformasi administrasi perpajakan. Keterbaruan ini memerlukan persebaran informasi sehingga bisa membantu seluruh pengguna untuk mempersiapkan diri dan meghadapi perubahan sistem administrasi perpajakan. Melalui model penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan makna ataupun dampak CTAS bagi seluruh pengguna dan juga pemerintah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Otoritas Pajak

Otoritas pajak dalam hal ini berperan sebagai penyedia atau pembuat sistem administrasi perpajakan dan juga kebijakannya. Melalui penelitian ini diharapkan bisa dipertimbangkan dalam membentuk suatu sistem administrasi yang baru serta meningkatkan pemberian edukasi ke masyarakat terkait implementasi CTAS. Hal ini dikarenakan penerapan sistem baru memerlukan waktu hingga bisa diterima oleh masyarakat.

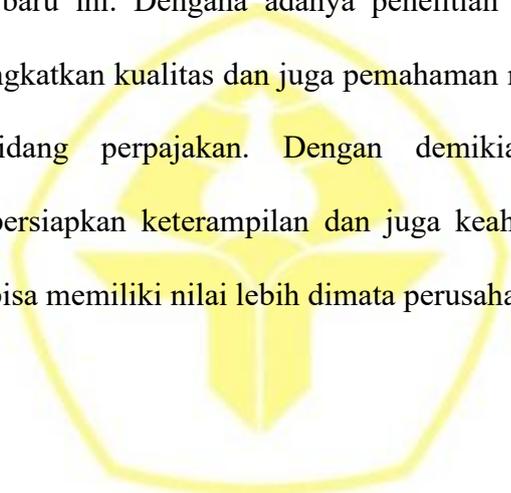
2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang berharga bagi Politeknik Negeri Bali dalam upaya meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Temuan temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam merancang program studi yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan industri. Selain itu hasil penelitian ini

juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para stakeholder terkait seperti industri, pemerintah dan masyarakat.

### 3) Bagi Mahasiswa

Mahasiswa memiliki peran dan sumbangsih dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada beberapa bulan kedepan mahasiswa yang akan menjalankan sistem administrasi perpajakan yang baru ini. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan juga pemahaman mahasiswa khususnya di bidang perpajakan. Dengan demikian mahasiswa bisa mempersiapkan keterampilan dan juga keahlian yang diperlukan agar bisa memiliki nilai lebih dimata perusahaan.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Menanggapi tujuan penelitian yang berfokus pada kemudahan penggunaan dan kemanfaatan sistem, dapat disimpulkan bahwa, penelitian ini menyoroti bahwa penerimaan teknologi sangat dipengaruhi oleh efisiensi dan kemudahan sistem saat digunakan. Dari segi inovasi kemudahan yang ditawarkan *coretax* adalah mendorong efektivitas, transparansi, dan digitalisasi perpajakan melalui sistem satu pintu dan *single sign on*. Untuk itu dalam hal implementasi DJP menunjukkan komitmen dengan penyempurnaan infrastruktur digital serta sosialisasi kepada publik. Namun proses adaptasi masih berjalan bertahap. Sama seperti sistem baru lainnya, *Coretax* menghadapi tantangan teknis dan non-teknis, terutama dalam proses adaptasi pengguna, khususnya wajib pajak. Tantangan lainnya meliputi keterbatasan infrastruktur, minimnya edukasi pengguna, serta belum optimalnya sistem backup dan notifikasi saat gangguan terjadi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang berdampak pada tingkat penerimaan sistem..

#### **B. Implikasi**

Penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi DJP, khususnya sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan strategi pengembangan dan penyempurnaan sistem *Coretax*. Perhatian utama diarahkan pada peningkatan aspek teknis, optimalisasi pengalaman pengguna,

efisiensi operasional, serta penguatan infrastruktur dan pemerataan program edukasi hingga ke wilayah terpencil. Dengan demikian, umpan balik dari para pengguna yang dikumpulkan secara konsisten dapat menjadi fondasi penting dalam memperkuat implementasi reformasi perpajakan digital secara holistik

Wajib pajak dapat memahami lebih lanjut mengenai pemanfaatan *Coretax* sebagai sarana layanan perpajakan yang terintegrasi dalam penelitian ini. Adaptasi terhadap sistem baru menuntut tinggi kesadaran wajib pajak akan literasi digital agar dapat memanfaatkan layanan yang disediakan secara optimal tanpa perlu merasa kebingungan. Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif wajib pajak dalam mendukung transformasi digital perpajakan.

Bagi Politeknik Negeri Bali, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi akademik untuk memperluas wawasan mahasiswa dan dosen dalam memahami perkembangan sistem administrasi perpajakan digital. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian tambahan dalam mata kuliah perpajakan dan sistem informasi akuntansi. Relevansi antara dunia perkuliahan dan industri semakin penting untuk menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi praktik kerja berbasis teknologi.

Bagi peneliti selanjutnya, temuan ini memberikan peluang untuk mengkaji lebih dalam sistem *Coretax* dari berbagai perspektif, seperti kepatuhan wajib pajak, keadilan fiskal, hingga integrasi antar instansi pemerintahan. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengevaluasi dampak *Coretax* terhadap pencapaian target penerimaan negara dan bisa menjadi

pondasi awal bagi pengembangan akademik dan kebijakan di masa mendatang.

### C. Saran

Mengacu pada hasil penelitian, beberapa saran berikut dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan *Coretax*. Bagi DJP, disarankan untuk terus melakukan pengembangan sistem secara teknis, meningkatkan stabilitas dan keamanan, serta memastikan respons cepat ketika terjadi kendala teknis agar pengguna tidak merasa ditinggalkan. Selain itu, perluasan sosialisasi dan pelatihan, terutama di wilayah tertinggal, juga perlu diperkuat guna memastikan pemerataan pemahaman. Bagi akademisi, diharapkan agar *Coretax* dapat dijadikan sebagai objek kajian dalam pengajaran dan riset, serta turut memberikan kritik dan rekomendasi ilmiah sebagai bagian dari kontribusi terhadap reformasi perpajakan digital. Sementara itu, bagi wajib pajak dan konsultan pajak, penting untuk terus meningkatkan literasi digital perpajakan dan memberikan umpan balik aktif kepada DJP atas pengalaman penggunaan sistem, agar pengembangan *Coretax* dapat lebih tepat sasaran. Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan sistem *Coretax* dapat terus berkembang menjadi platform perpajakan digital yang tidak hanya inovatif secara teknologi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata pengguna di lapangan serta memperkuat komitmen reformasi perpajakan yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Tofan. (2023). Core tax system menurut persepsi konsultan dan usulan implementasi untuk pemerintah. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121–129. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>
- Alamri, F., & Widyatama, A. (2019). Technology Acceptance Model (TAM) Sebagai Solusi Atas Minat Penggunaan Layanan E – Registration Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 10(2), 89–99.
- Arifin, D., Santoso, A. P. A., & Poniman, P. (2025). Discourse on the Coretax System in Indonesia: A Study of Legal Certainty and Guarantees for Taxpayers. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(02), 118–127. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i02.413>
- Bahiyah, U., & Gumiandari, S. (2024). Upaya Menumbuhkan Self-Confidence Berbicara Bahasa Arab Melalui Aplikasi Plotagon Pada Mahasiswa Iain Syekh Nurjati Cirebon. In *General and Specific Research* (Vol. 4, Issue 2). <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>
- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101754. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Economics and Digital Business Review Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Countries, I. N. O. (2023). *Revenue Statistics*.
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Dharmawan, I. (2024). *Coretax : Peta Baru Perpajakan Indonesia*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/coretax-peta-baru-perpajakan-di-indonesia>
- Diah, S., Sari, A., Rossanti, S. N., Aulia, C. R., Nisa, S., Korespondensi, E. P., & Luthfi, F. (2025). *Pengaruh Coretax Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai dalam Mengelola Pajak di Kanwil DJP I Jawa Timur*. 4, 20–28.
- Fitriya. (2025). *Coretax Administration System dan Cara Kerjanya*. KlikPajak. <https://klikpajak.id/blog/core-tax-administration-system/>
- Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 08(06), 46–56. <https://doi.org/10.51505/ijebmr.2024.8604>
- Kurniati, D. (2023). *Kerek Tax Ratio, ADB Dorong Pemanfaatan Teknologi*

- Digital*. DDTC. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808863/pkp-baru-tak-bisa-ikut-gunakan-e-faktur-ternyata-ini-alasannya>
- Kusno, H. R., Mei, C., Tan, L., Suratman, A., Darmayasa, N., & Leni, D. I. (2024). *Insentif Pajak Kendaraan Listrik di Indonesia : untuk Rakyat atau Konglomerat ?* 20(3), 671–679.
- Machdar, N. M. (2019). the Effect of Information Quality on Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use. *Business and Entrepreneurial Review*, 15(2), 131–146. <https://doi.org/10.25105/ber.v15i2.4630>
- Maryam, W., Uleng, B., Ekowati, L., Studi, P., Keuangan, A., Terapan, P. S., Akuntansi, J., & Jakarta, P. N. (2025). *Analisis Persepsi Wajib Pajak Terhadap Implementasi Core Tax Administration System Ditinjau dari Relative Advantage ( Studi Kasus PT XYZ ).* 2022.
- Mavhandu-Mudzusi, A. H., Moyo, I., Mthombeni, A., Ndou, A., Mamabolo, L., Ngwenya, T., Marebane, T., & Netshapapame, T. (2022). WhatsApp as a Qualitative Data Collection Method in Descriptive Phenomenological Studies. *International Journal of Qualitative Methods*, 21, 1–9. <https://doi.org/10.1177/16094069221111124>
- Migliore, G., Wagner, R., Cechella, F. S., & Liébana-Cabanillas, F. (2022). Antecedents to the Adoption of Mobile Payment in China and Italy: an Integration of UTAUT2 and Innovation Resistance Theory. *Information Systems Frontiers*, 24(6), 2099–2122. <https://doi.org/10.1007/s10796-021-10237-2>
- Najjicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 169. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568>
- Noor Ardiansah, M., Chariri, A., Rahardja, S., & Udin. (2020). The effect of electronic payments security on e-commerce consumer perception: An extended model of technology acceptance. *Management Science Letters*, 10(7), 1473–1480. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.12.020>
- Nurhaeni, D. F., Masitoh, D., Shofurani, H., & Livtanta, N. K. (2025). *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem CORETAX : Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025.* 6(1), 20–36.
- Panjaitan, M. R. (2024). *Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan.* 2(4).
- Pendapatan, A., & Makro, K. E. (2024). *Kinerja Positif APBN 2023 Tetap Menjaga Momentum Pemulihan serta Memperbaiki Pemerataan dan Kesejahteraan.* 6–8.
- Permatasari, A. A., Ramadhan, P., Wahono, P., & Pahala, I. (2025). *TOFEDU : The Future of Education Journal An Analysis of Challenges and Strategic Optimization in the Implementation of Coretax for Tax Reporting in Indonesia.* 4(6), 1820–1828.

- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). *Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia*. 3(2), 114–118.
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 179–191. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480>
- Rumapea, N. M. K. (n.d.). *Analisis Dampak Perubahan Iklim terhadap Sektor Pertanian*. 1–11.
- Saeful Bahri, D., & Salsalina Lingga, I. (2022). Perception of Usefulness, Subjective Norms, and Perception of Behavioral Control on Interest in Using E-Filing with Attitude using E-Filing as Intervening Variables (Case Study at KPP Pratama Cimahi). *Index Proceeding on Management, Education and Social Science (MESS)*, 2(1), 91–101. <http://proceeding.rsfpres.com/index.php/mess/>
- Saptati, R. (2023). *PSIAP Untuk Layanan Pajak Lebih Mantap*. Media Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/psiap-untuk-layanan-pajak-lebih-mantap>
- Schedule, I., Travel, O. F., Expenses, O., Hancock, A. D., Formation, A. F., Armstrong, N., Le, F., Faso, B., Le, F., On, F., Le, L. L. L. P. L., Kone, I., Ou, I., Laquelle, I., Quelle, T., Scheme, N. G., Pizer, W. A., Weintraub, S., Formation, A. F., ... Gh, E. (2022). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Journal of Economic Perspectives*, 2(1), 1–4. <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon-2008-Coaching-d%27equipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017>
- Sitasari, N. W. (2022). Mengenal Analisa Konten Dan Analisa Tematik Dalam Penelitian Kualitatif. *Forum Ilmiah*, 19, 77.
- Urgensinya, A. P. A., Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). *CORETAX SYSTEM DALAM UPAYA REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN*, . 6(1).
- Victoriia, P. (2020). *Psychology the Psychological Role of Ethnic Identity*. 3(March), 31–34. <https://doi.org/10.31435/rsglobal>
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). *Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax : Analisis Hukum dan Akuntansi*. 2(4), 149–158.
- Wulandari, D. S., & Dasman, S. (2023). Taxpayer Compliance: The Role of Taxation Digitalization System and Technology Acceptance Model (TAM) with Internet Understanding as a Mediating Variable. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(6), 2385–2396.

<https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i6.4653>